



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP 3 A P2K B)**

Jln. Singosari Nomor. 02 Mataram Kode Pos 83127 Telpn (0370)634800 Fax 631829
Web Site <http://www.dp3ap2kb.ntbprov.go.id> e_mail : dinasp3ap2kbnb@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 055-a /DP3AP2KB/2022

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-493 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Meningat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Informasi Birokrasi 2010 – 2025)
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2)
10. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 Nomor 66);
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-493 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juli 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

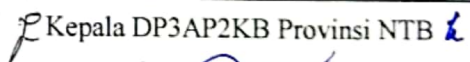
PERTAMA : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlampir:

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi dengan keluaran/*Output* yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sekaligus sebagai dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM

Pada Tanggal : , November 2022

 Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB



Dra.T.WISMANINGSIH DRAJADIAH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630328 198703 2 012

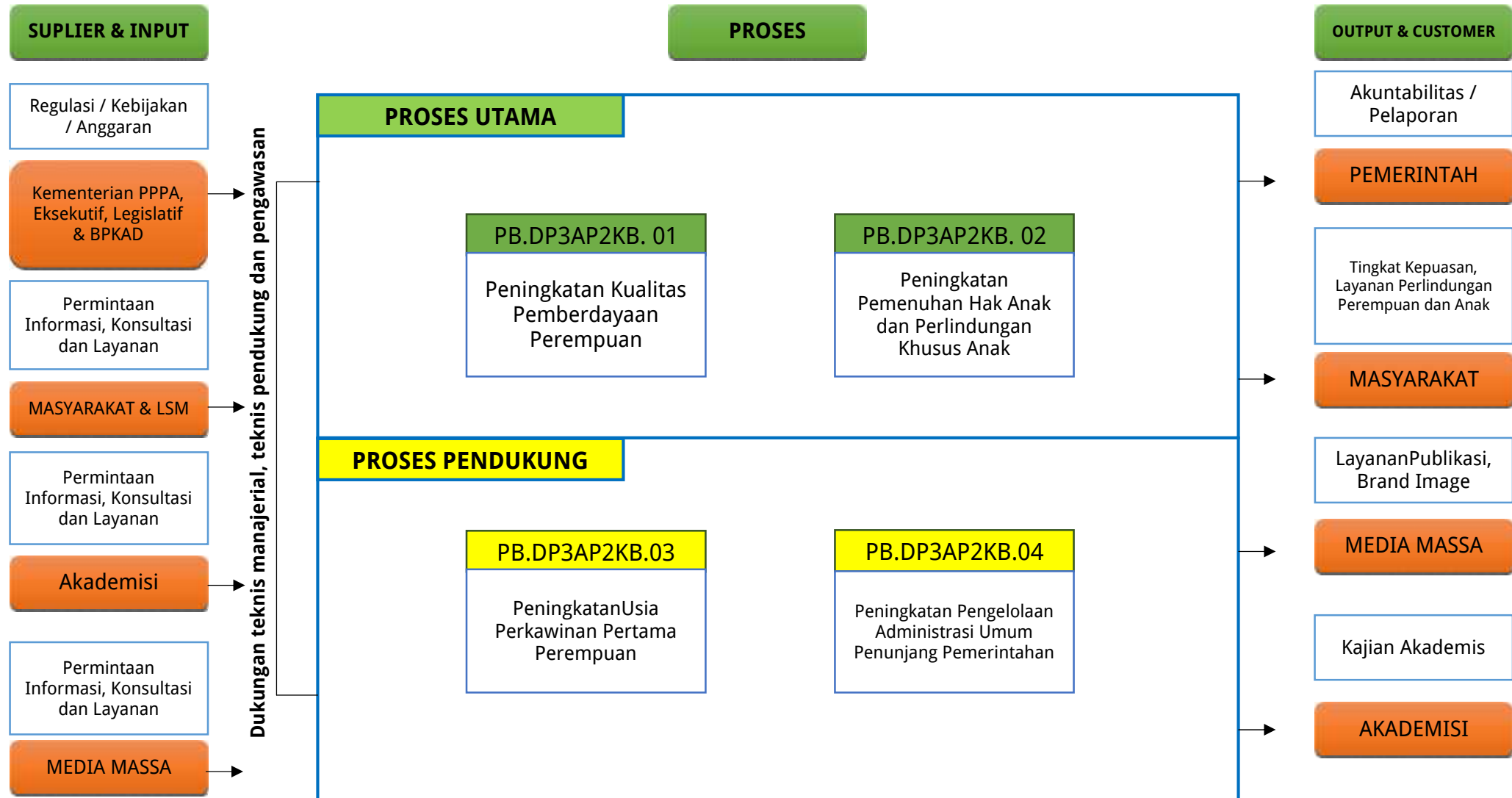
PETA PROSES BISNIS DP3AP2KB PROVINSI NTB

A. IDENTIFIKASI INSTRUMEN PENENTUAN PROSES

Misi 6: **NTB Aman dan Berkah** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

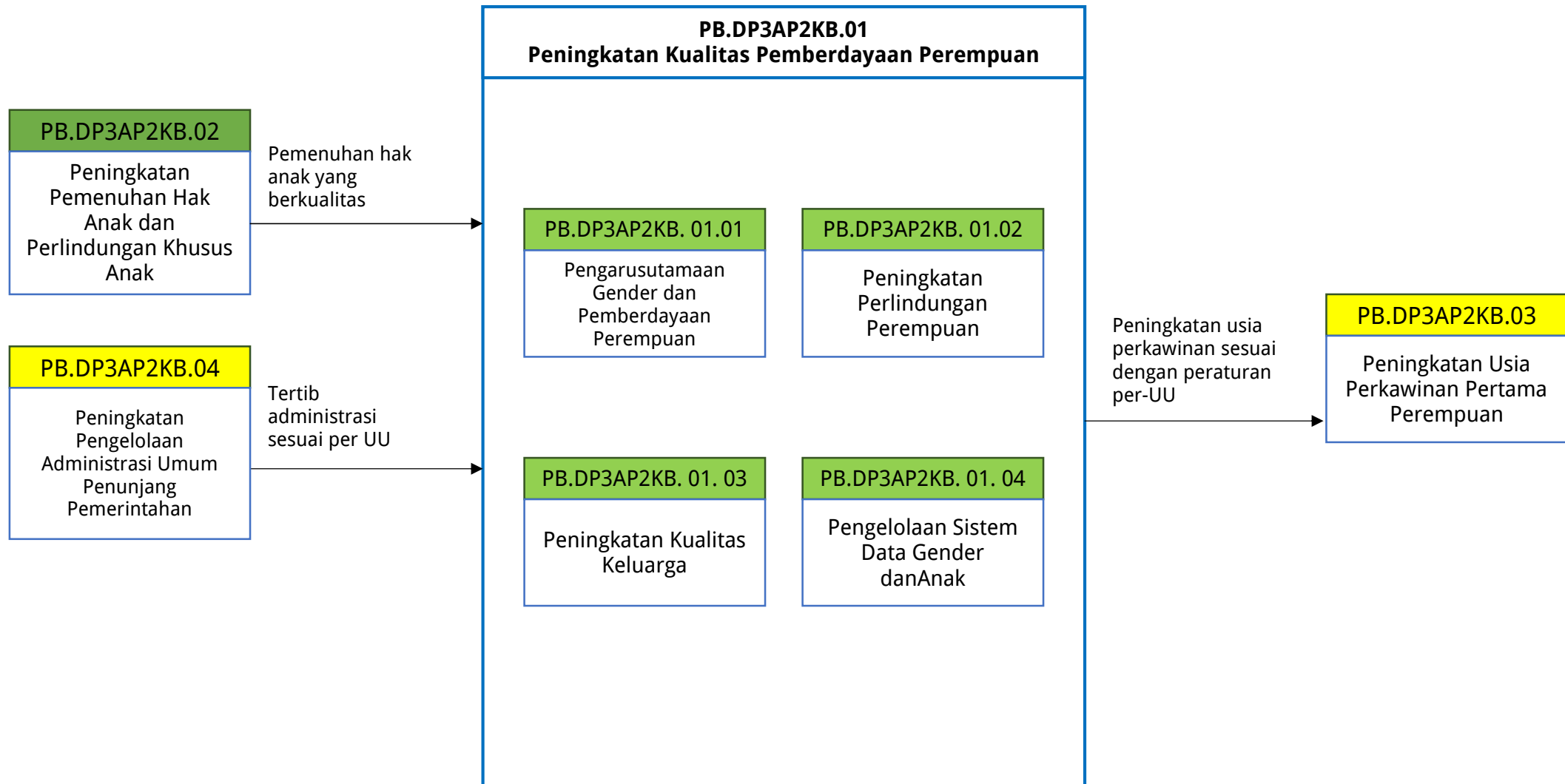
NO	TUJUAN	SASARAN	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES	KODE SUB PROSES	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas Pemberdayaan Perempuan	Utama	PB.DP3AP2K B.01	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PB.DP3AP2KB.0 1.01	Bidang KHP, PP
						Perlindungan Perempuan	PB.DP3AP2KB.0 1.02	Bidang PP, KHP, UPTD
						Peningkatan Kualitas Keluarga	PB.DP3AP2KB.0 1.03	Bidang KHP, PPKB
						Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	PB.DP3AP2KB.0 1.04	Bidang KHP
2	Terwujudnya Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Utama	PB.DP3AP2K B.02	Pemenuhan Hak Anak	PB.DP3AP2KB.0 2.01	Bidang PHA, PKA
						Perlindungan Khusus Anak	PB.DP3AP2KB.0 2.02	Bidang PKA, PHA
		Pendewasaan usia perkawinan pertama	Peningkatan usia perkawinan pertama perempuan	Pendukung	PB.DP3AP2K B.03	Pengendalian Penduduk	PB.DP3AP2KB.0 3.01	Bidang PPKB, PKA, PHA
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PB.DP3AP2KB.0 3.02	Bidang PPKB, PP
						Pemberdayaandan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PB.DP3AP2KB.0 3.03	Bidang PPKB, KHP
			Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Penunjang Pemerintahan	Pendukung	PB.DP3AP2K B.04	Peningkatan Pengelolaan Intern Administrasi	PB.DP3AP2KB.0 4.01	Sekretariat DP3AP2KB Provinsi NTB

B. PETA PROSES BISNIS

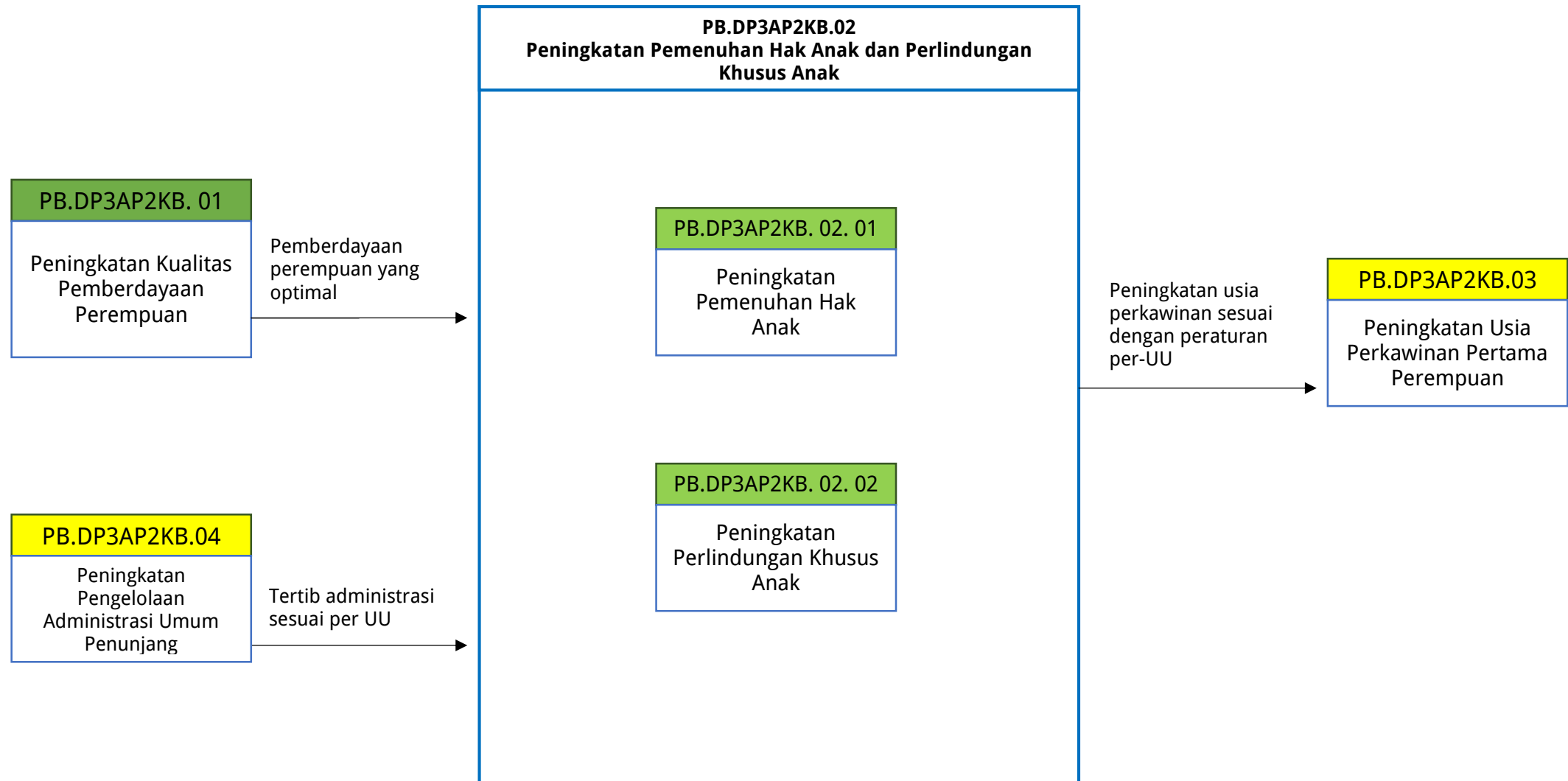


C. PETA SUB PROSES BISNIS

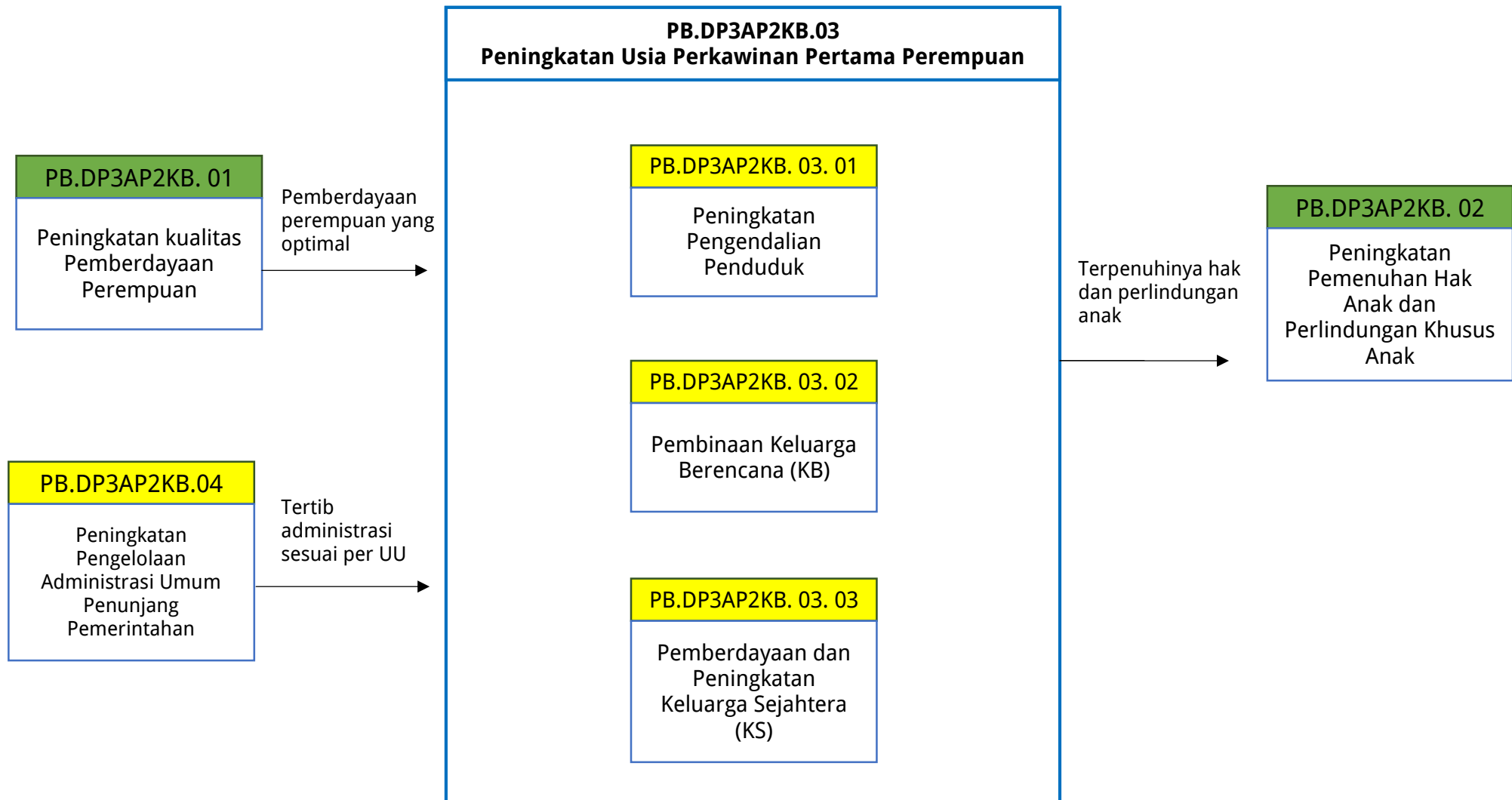
1. PB.DP3AP2KB.01 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan



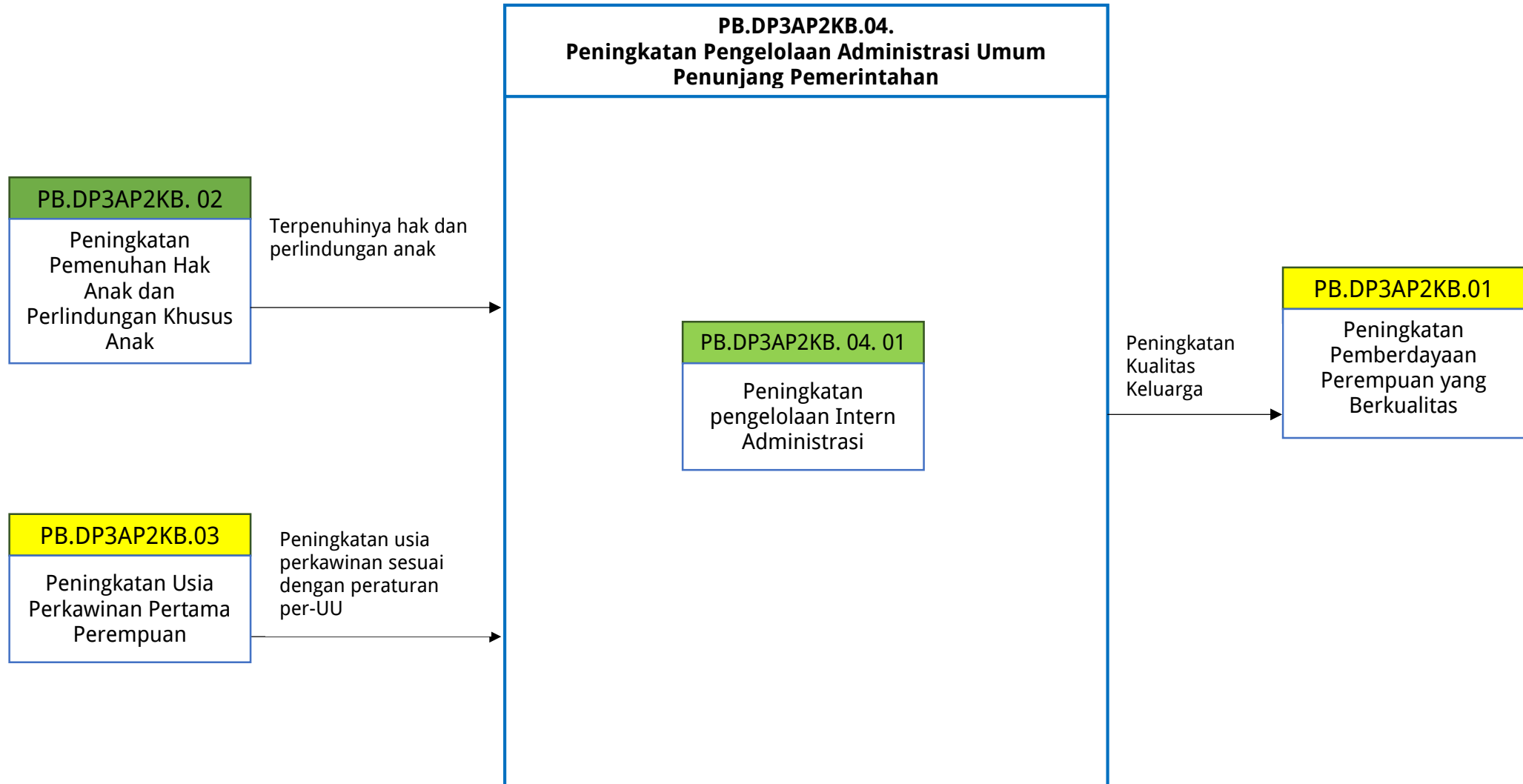
2. PB.DP3AP2KB. 02 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak



3. PB.DP3AP2KB.03 Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan

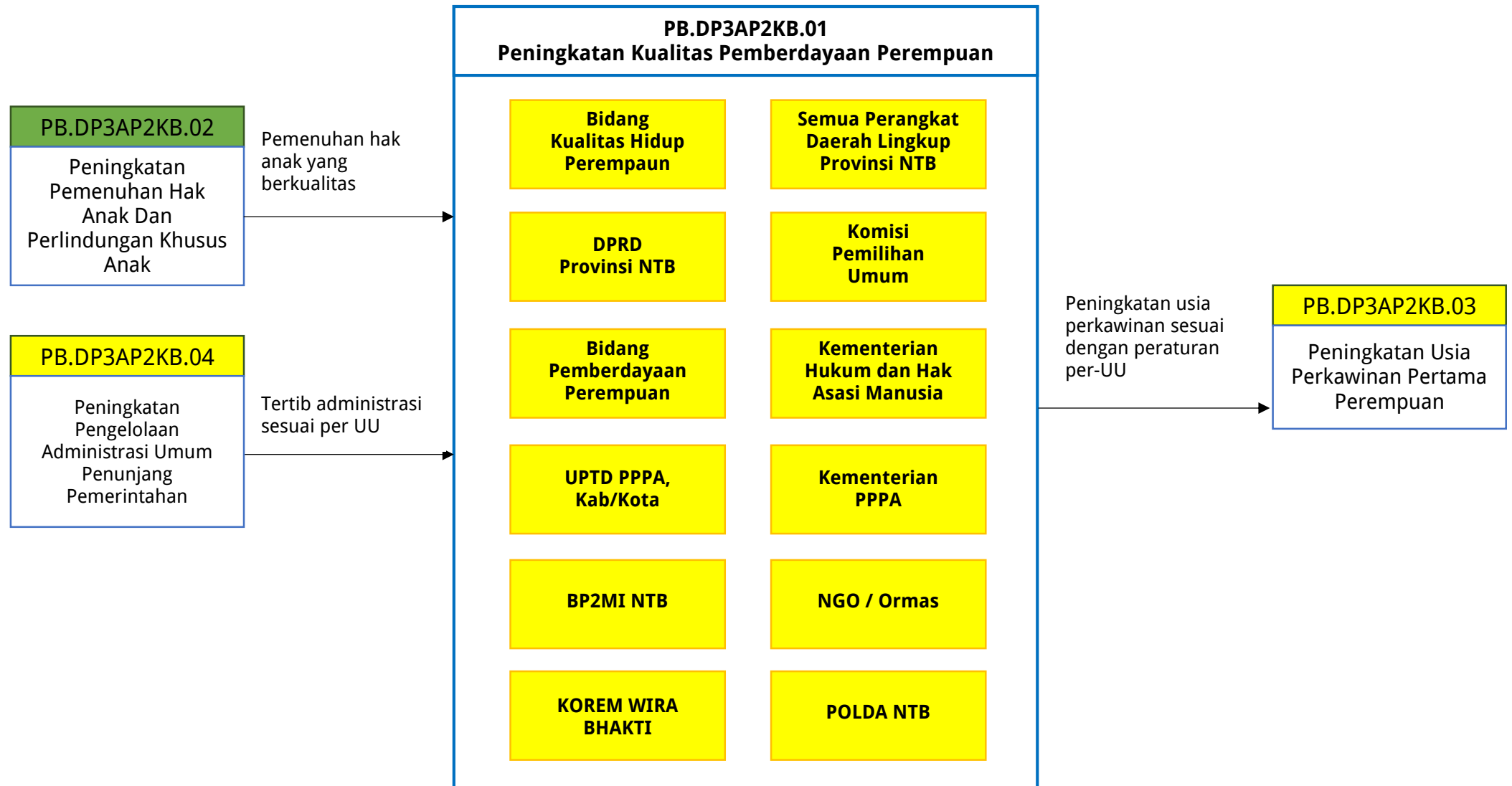


4. PB.DP3AP2KB.04 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Penunjang Pemerintahan



D. PETA RELASI

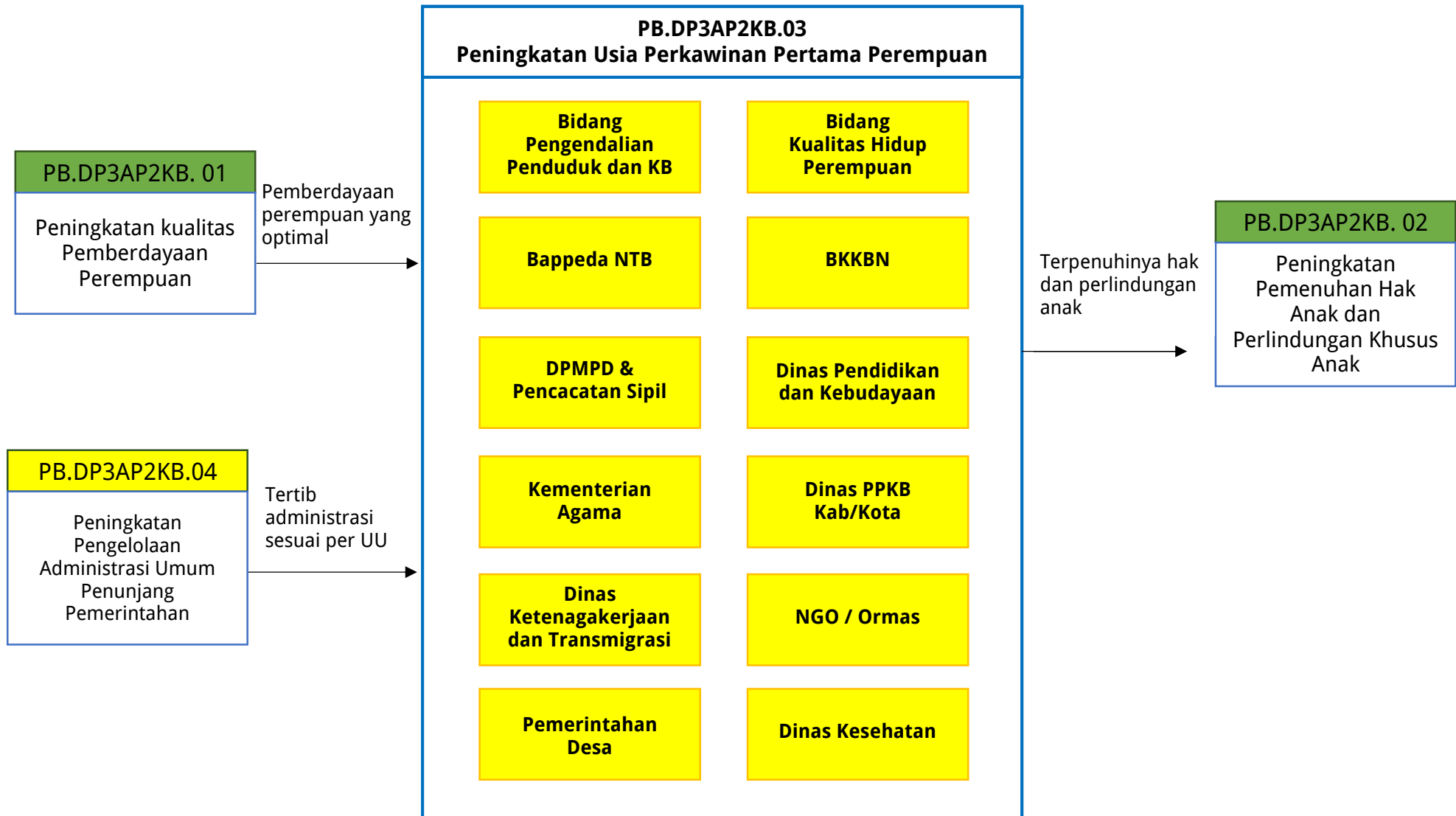
1. PB.DP3AP2KB.01 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan



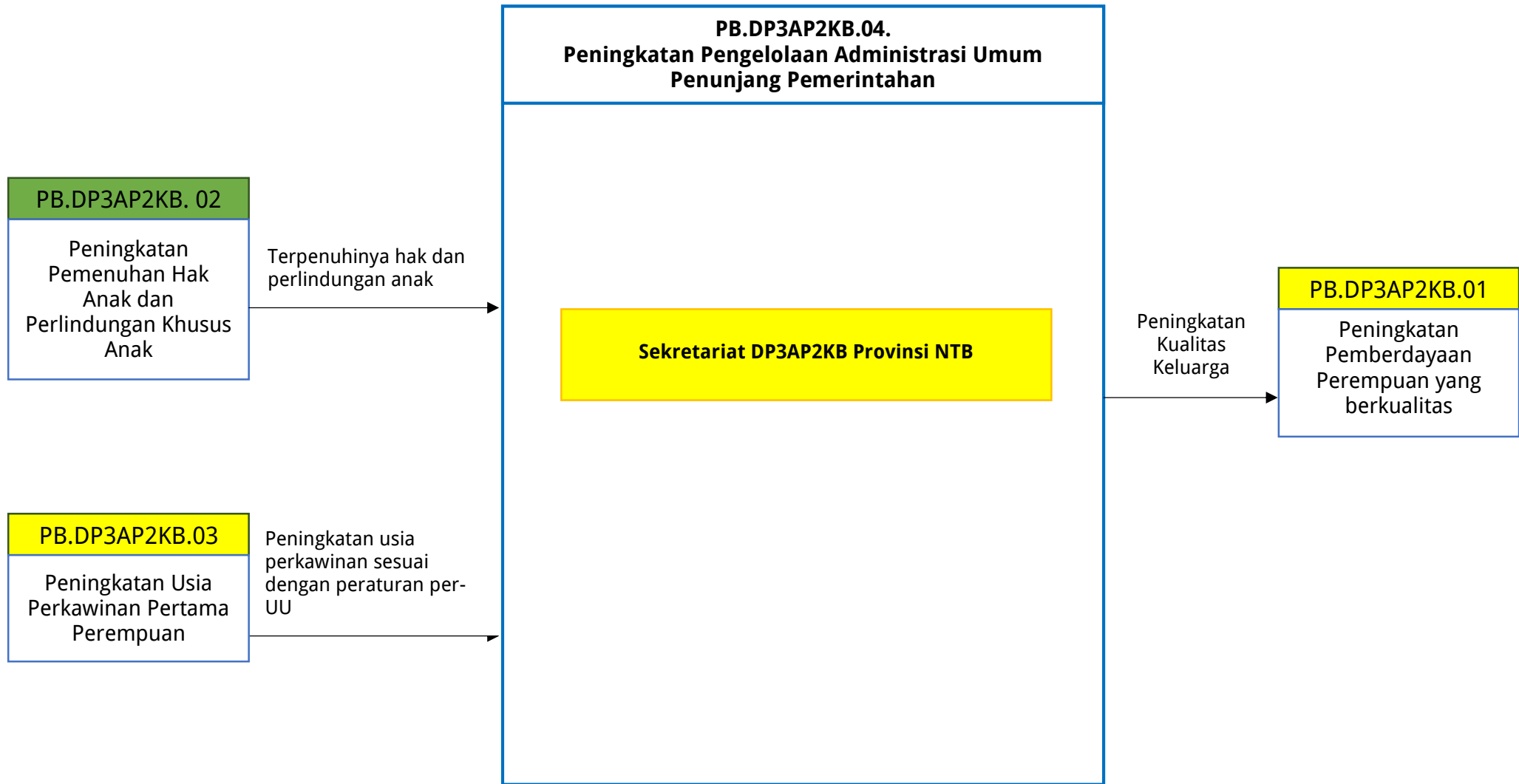
2. PB.DP3AP2KB. 02 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak



3. PB.DP3AP2KB.03 Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan



4. PB.DP3AP2KB.04 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Penunjang Pemerintahan



E. TABEL INSTRUMEN PENENTUAN LINTAS FUNGSI

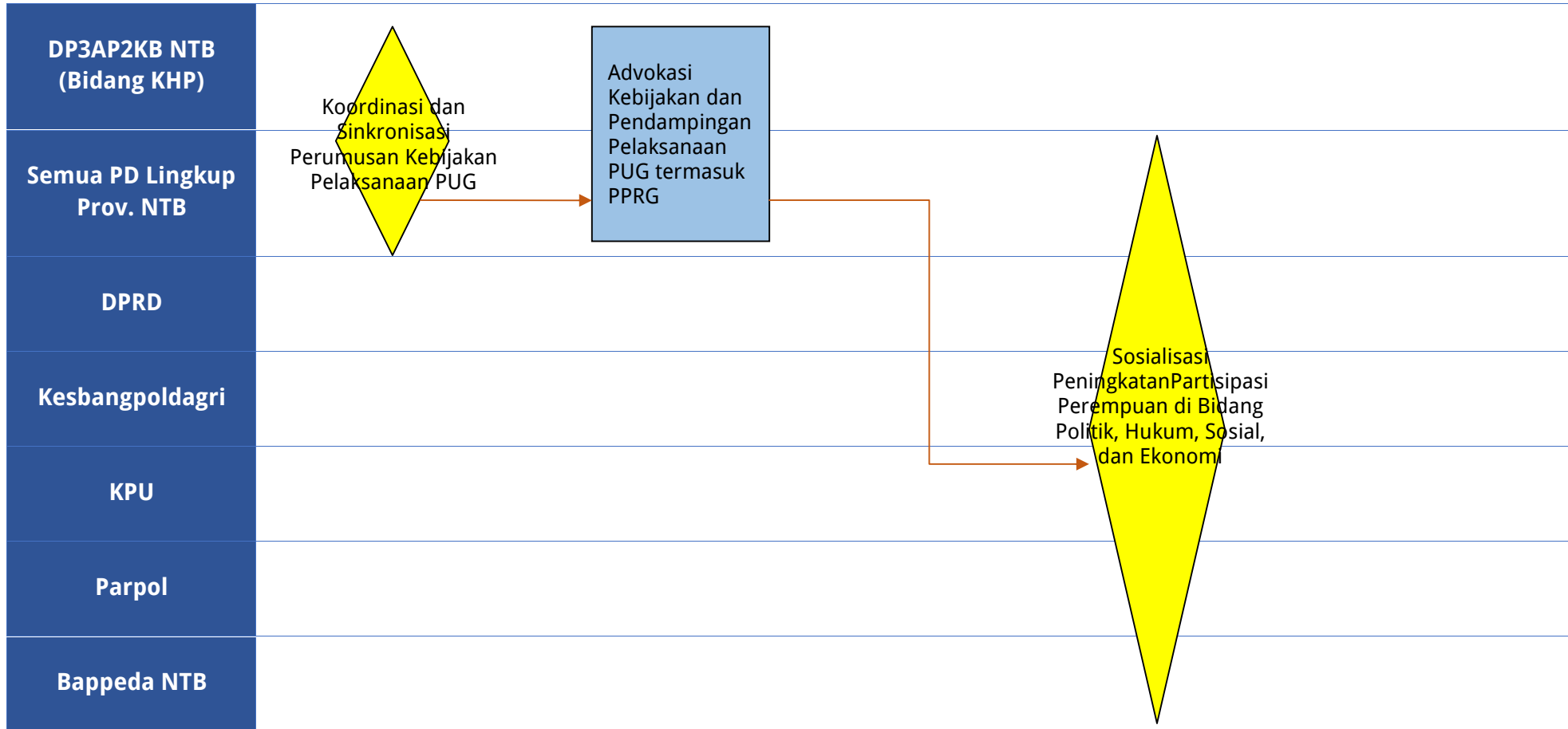
NO	SUB PROSES	OUTPUT/OUTCOME	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	IDENTIFIKASI AKTIVITAS (SUB KEGIATAN)	PJ AKTIVITAS
PB.DP3AP2KB.0 1.01	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Proporsi kader perempuan di partai politik	Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> DP3AP2KB (Bidang KHP), Semua PD DP3AP2KB, Semua PD DP3AP2KB, DPRD, Kesbangpoldagri, KPU, Parpol, Bappeda NTB
PB.DP3AP2KB.0 1.02	Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Bidang Perlindungan Perempuan(PP)	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> DP3AP2KB Provinsi & Kab/Kota, Biro Hukum, Disnaker, Polda NTB, Kemenkumham, Dinsos, BP2MI NT, Korem WB, NGO DP3AP2KB Provinsi dan Kab/Kota, UPTD Kab/Kota, Disnaker, Disdag, Disperin, NGO
PB.DP3AP2KB.0 1.03	Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Model Ketahanan Keluarga	Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> DP3AP2KB NTB, Dinas Koperasi, Puspaga, NGO DP3AP2KB NTB, Dinas Koperasi, Puspaga, NGO
PB.DP3AP2KB.0 1.04	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak	Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Pemberitahuan kepada Inatansi terkait Lingkup Provinsi NTB Pengumpulan Data Pengolahan Data Penyusunan Buku Saku Data Gender dan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> KHP Semua PD KHP KHP KHP
PB.DP3AP2KB.0 2.01	Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang memenuhi Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 	<ol style="list-style-type: none"> DP3AP2KB, Semua PD, NGO DP3AP2KB, Semua PD, NGO

PB.DP3AP2KB.0 2.02	Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya Angka Kekerasan dan Perkawinan Anak	Bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordiansi dan Singkronisasi Pencegahaan Kekerasan terhadap Anak 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DP3AP2KB, Dinas Perpustakaan dan kerasipan, Diskominfo, Dinsos, Dikbud, Dikes, NGO 2. DP3AP2KB, Dinas Perpustakaan dan kerasipan, Diskominfo, Dinsos, Dikbud, Dikes, NGO 3. DP3AP2KB, Dinas Perpustakaan dan kerasipan, Diskominfo, Dinsos, Dikbud, Dikes, NGO 4. DP3AP2KB, Dinas Perpustakaan dan kerasipan, Diskominfo, Dinsos, Dikbud, Dikes, NGO
PB.DP3AP2KB.0 3.01	Pengendalian Penduduk	<p>Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk</p> <p>Jumlah model strategi pengendalian penduduk yang dikembangkan.</p>	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PPKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Grand Design Pengendalian Kependudukan) 2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di SLTA – MA, jalur Non formal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DP3A2KB, Bappeda, BKKBN, DPMD Dukcapil, Disnakertrans, Kesehatan 2. DP3AP2KB, Bappeda, BKKBN, DPMD Dukcapil, Kemenag, PPKB Kab/Kota.
PB.DP3AP2KB.0 3.02	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<p>Jumlah Design Program KIE KKBPK yang dihasilkan</p> <p>Persentase Keluarga Anak Usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS</p>	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK 2. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DP3AP2KB, BKKBN, Dikes, Dikbud, NGO/Ormas 2. DP3AP2KB, BKKBN, Dikes, Dikbud, NGO/Ormas
PB.DP3AP2KB.0 3.03	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memiliki 1000 HPK	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PPKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 2. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN, Dinas Sosial, DMPD Dukcapil, Pemerintah Desa, Pengelelola Poktan, Dikes,

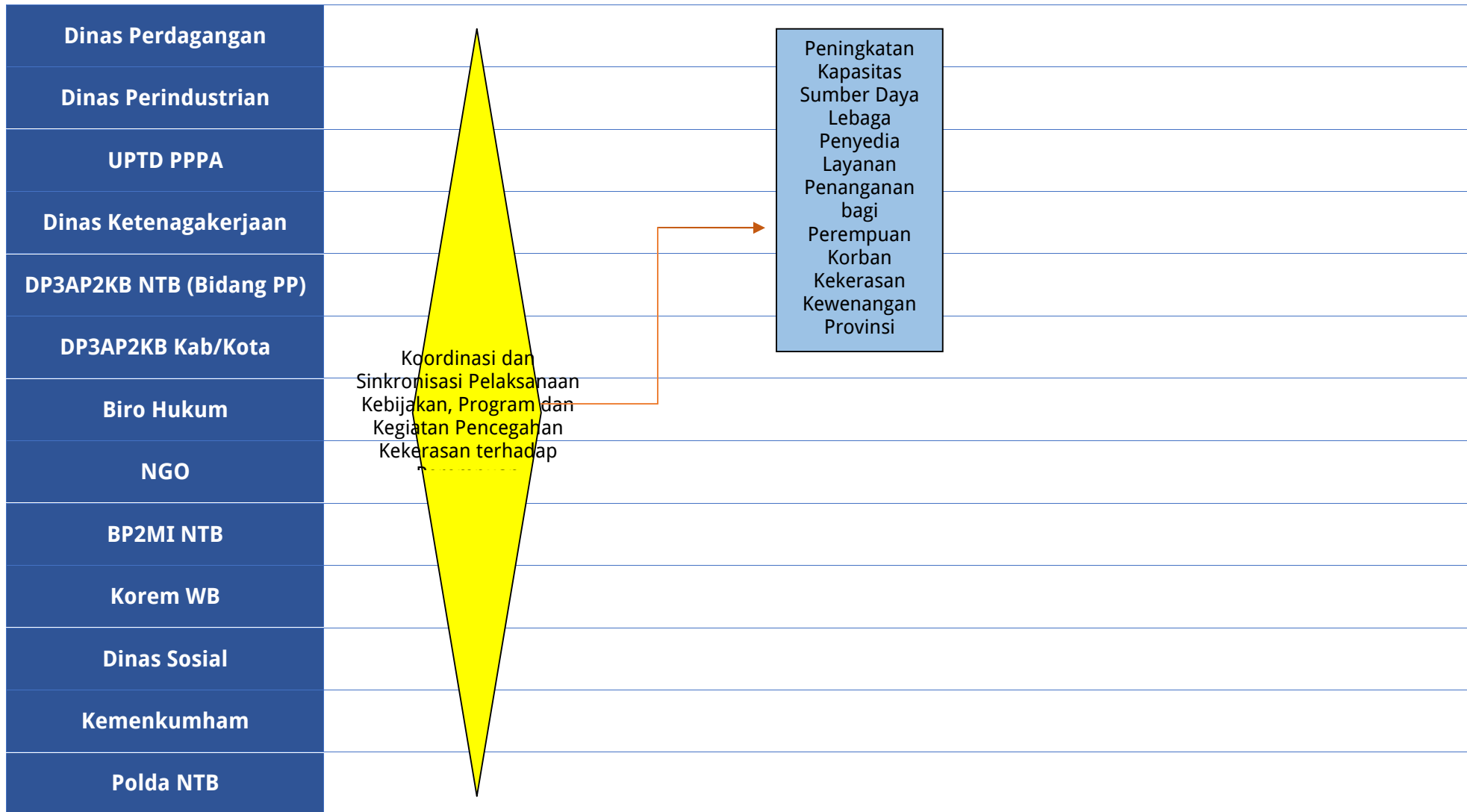
		Jumlah BKB yang holistic integrative dengan posyandu dan PAUD		Ketahanan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2. BKKBN, Dinas Sosial, DMPD Dukcapil, Pemerintah Desa, Pengelelola Poktan, Dikes.
PB.DP3AP2KB.0 3.03	Peningkatan Pengelolaan Intern Administrasi	Persentase tertib administrasi penunjang urusan pendukung	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan anggaran (DPA) 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Negara 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Barang Logistik SKPD 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Akhir 10. Laporan Pelaksanaan Keuangan Kinerja Akhir Tahun SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subag Perencanaan 2. Subag Perencanaan 3. Subag Perencanaan 4. Subag Perencanaan 5. Subag Perencanaan 6. Subag Perencanaan 7. Subag Umum dan kepegawaian 8. Subag Umum dan Kepegawaian 9. Subag Perencanaan 10. Subag Perencanaan

F. PETA LINTAS FUNGSI / CROS FUNGTIONAL MAP (CFM)

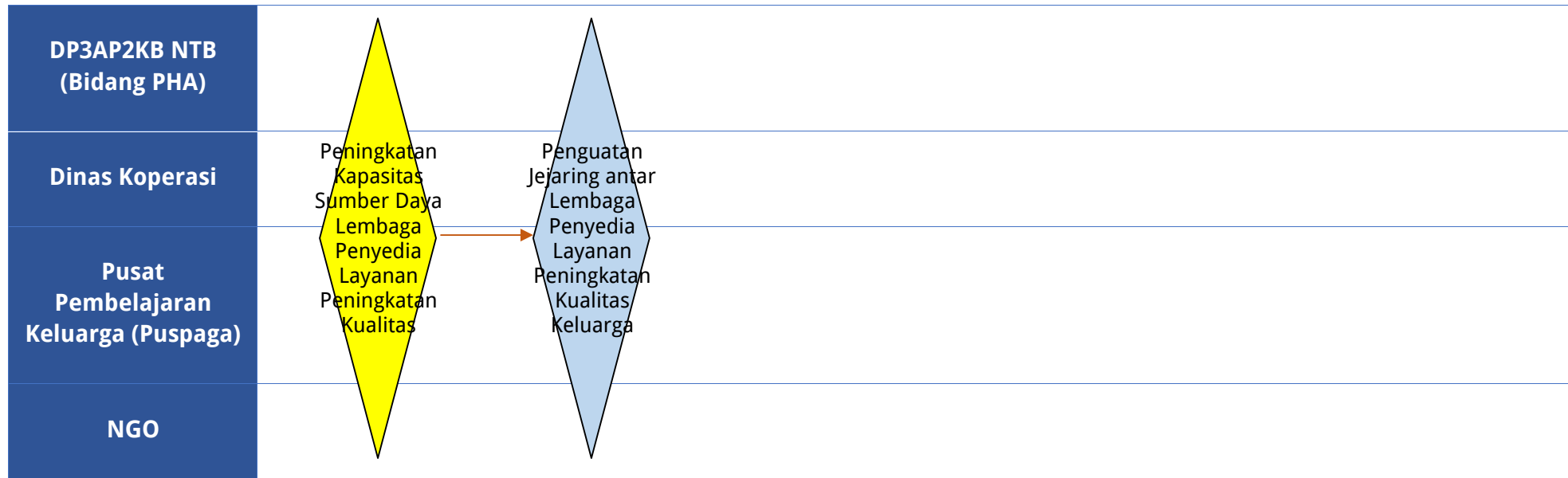
PB.DP3AP2KB.01.01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



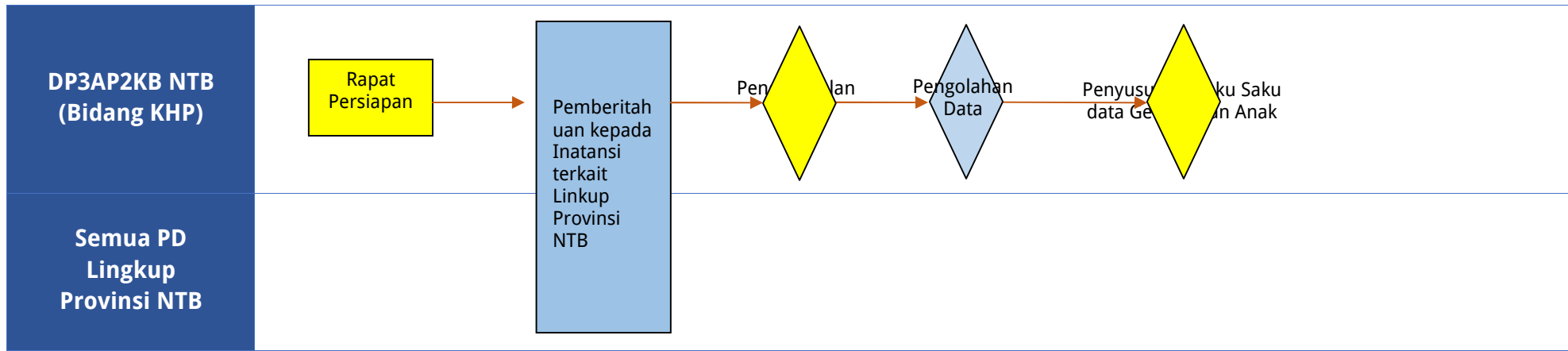
PB.DP3AP2KB.01.02 Perlindungan Perempuan



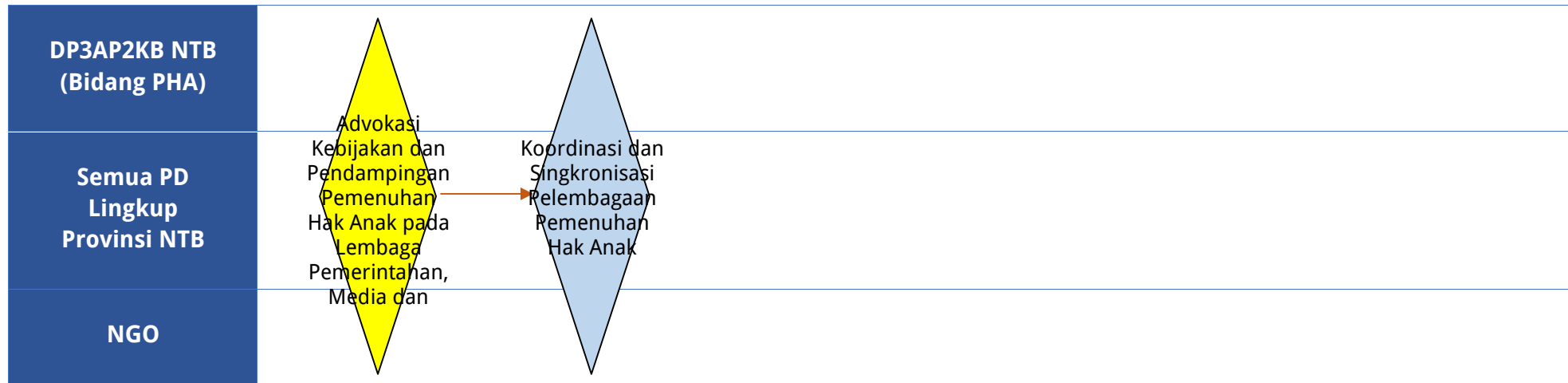
PB.DP3AP2KB.01.03 Peningkatan Kualitas Keluarga



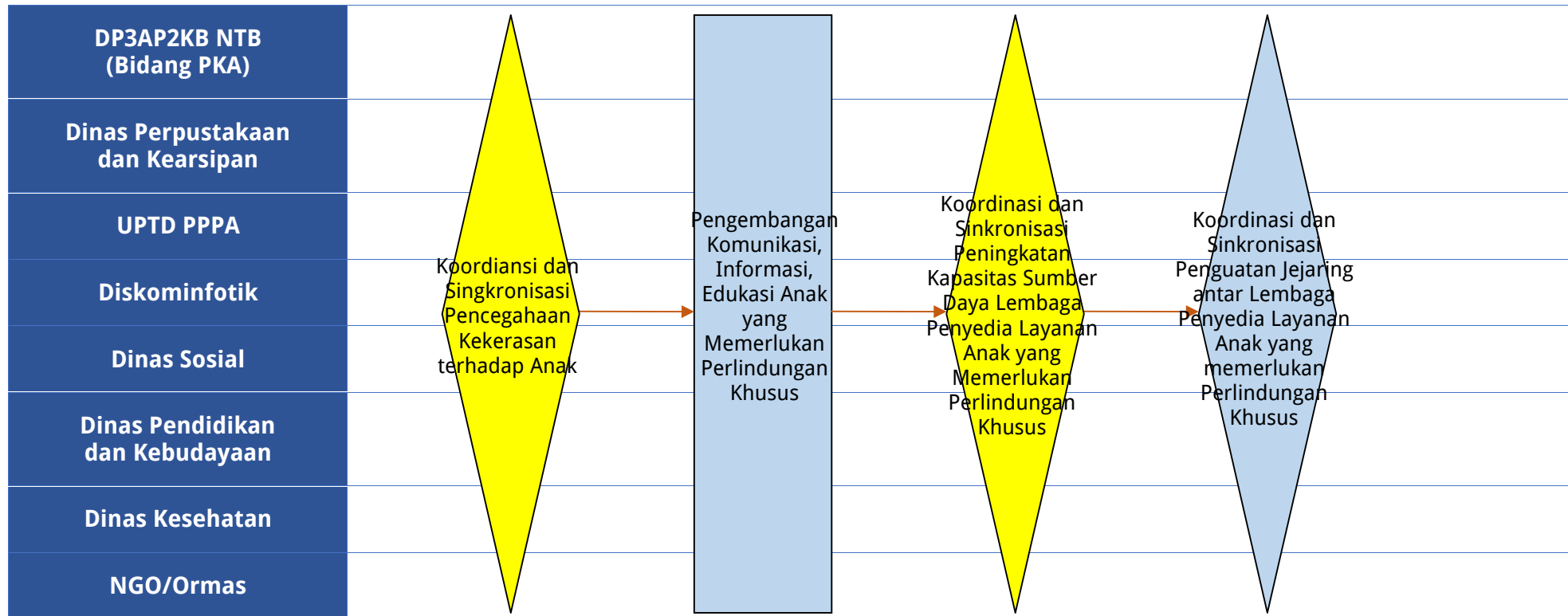
PB.DP3AP2KB.01.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



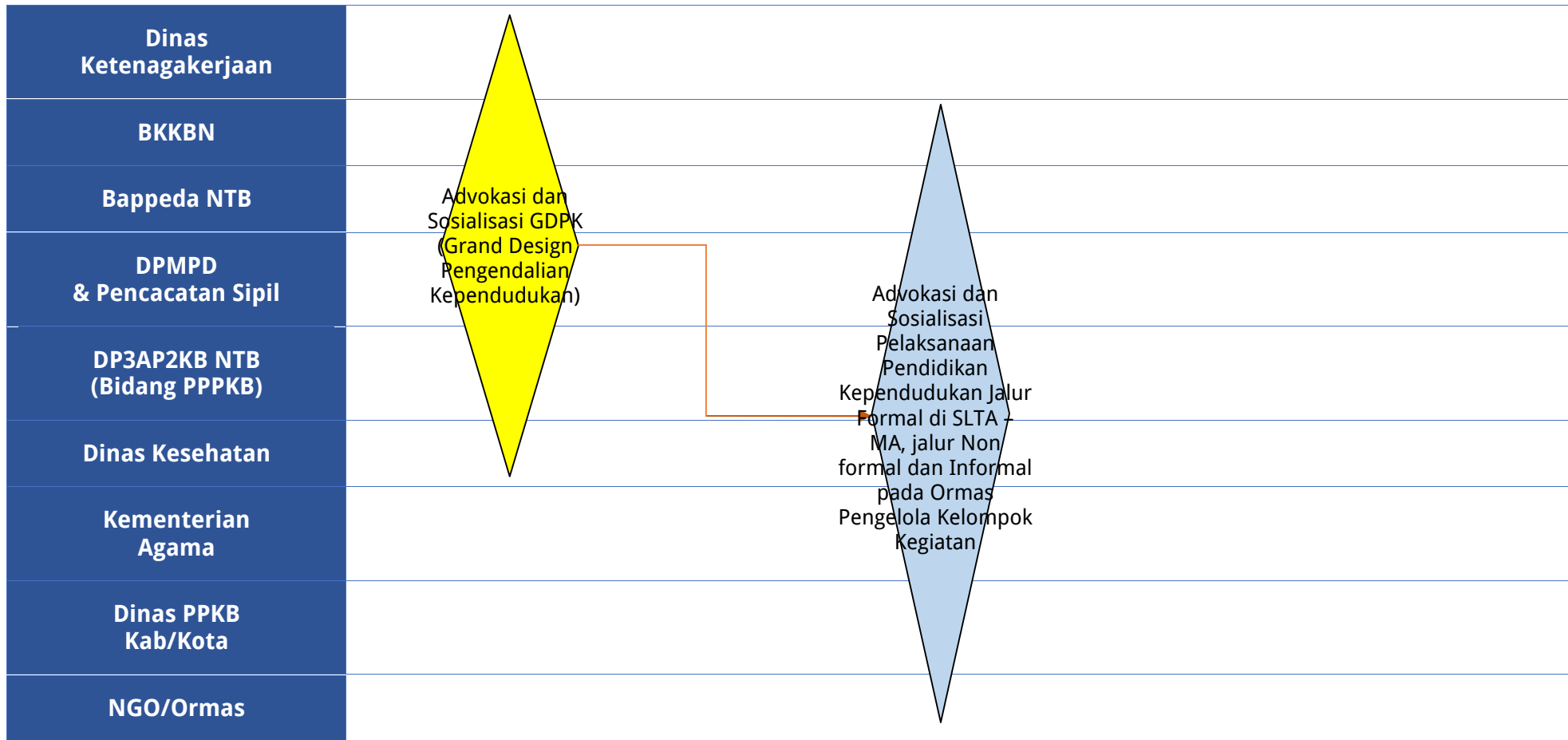
PB.DP3AP2KB.02.01 Pemenuhan Hak Anak



PB.DP3AP2KB.02.02 Perlindungan Khusus Anak



PB.DP3AP2KB.03.01 Pengendalian Penduduk



PB.DP3AP2KB.03.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

<p>DP3AP2KB NTB (Bidang PPPKB)</p>		
<p>BKKBN</p>	<p>Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam</p>	<p>Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam</p>
<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK</p>	<p>Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>
<p>NGO/Ormas</p>		

PB.DP3AP2KB.03.03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



PB.DP3AP2KB.04.01 Peningkatan Pengelolaan Intern Administrasi

